

**SURVEY TERHADAP PERANAN DINAS PERINDAGKOP
DAERAH KAB. NGANJUK DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL
(STUDI PADA SENTRA INDUSTRI DAN USAHA KECIL GENTENG
DESA KALORAN KEC. NGRONGGOT KAB. NGANJUK)**

Purnomo Sidik¹, Agustin Sukarsono², Erna Habibah³

^{1,2,3}) Program Studi Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi POMOSDA Nganjuk
e-mail: [1, \[2agustystt@gmail.com\]\(mailto:agustystt@gmail.com\), \[3ernahabibah07@gmail.com\]\(mailto:ernahabibah07@gmail.com\)](mailto:purnomo@gmail.com)

ABSTRAK

Keberadaan industri kecil saat ini sangat penting artinya bagi kesejahteraan masyarakat. Karena dapat menopang perekonomian dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, apabila dilihat secara geografis, produk industri kecil memperoleh proteksi alami. Namun dalam perkembangannya, peranan industri kecil mendapat banyak kendala dan tidak jarang keberadaannya mudah gulung tikar. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala, diantaranya dalam *bidang permodalan, kualitas sumber daya, sarana dan prasarana, serta bidang pemasaran yang terbatas*. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi produk yang dihasilkan. Selanjutnya akan berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan, yang mempersulit pengumpulan modal yang dibutuhkan untuk pengembangan usahanya. Untuk itulah peranan pemerintah dalam membina industri kecil sangat diperlukan agar industri kecil tersebut dapat berkembang lebih pesat dan tetap menjaga kualitas produk yang ada. Guna mendukung hal tersebut diatas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada studi untuk memperoleh gambaran mengenai suatu gejala pada saat penelitian dilakukan terhadap para pelaku industri kecil genteng di desa Kaloran, kecamatan Ngronggot, kabupaten Nganjuk. Melalui analisa statistik deskriptif, maka ditunjukkan variabel tingkat kemanfaatan peranan Dinas Perindagkop Kabupaten Nganjuk cukup tinggi. Ini dirasakan oleh para pelaku industri kecil yang dapat diketahui dari peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Dengan didukung pembinaan secara berkelanjutan. Dari hasil analisa diatas berarti dapat disimpulkan bahwa dengan pembinaan dari Dinas terkait dan lembaga mandiri yang mengakar pada masyarakat akan mampu mendongkrak semangat usaha para pelaku industri kecil untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas baik dari segi perencanaan, pengembangan rencana, proses produksi dan kualitas produk. Yang akhirnya mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Kata Kunci : *Pembinaan, Industri Kecil, Peningkatan Pendapatan*

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah nampaknya mulai menetapkan untuk memperhatikan sektor industri sebagai prioritas dalam pembangunan untuk mendukung bidang ekonomi. Perwujudan perekonomian yang potensial diantaranya dapat diwujudkan melalui pembangunan industri, yang bercirikan industri kuat dan tangguh. Berkaitan dengan industri, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, untuk mengatur serta memberikan perlindungan terhadap perkembangan industri di Indonesia.

Pengembangan sektor industri yang sesuai dengan kondisi bangsa saat ini adalah industri kecil. Industri kecil sebagai pelaku ekonomi disamping yang berskala besar dan menengah, memiliki daya tahan yang cukup tangguh jika dibandingkan dengan industri besar. Industri kecil adalah usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa misalnya transportasi, atau jasa perhubungan yang menggunakan modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif kecil. Selain itu, industri kecil

adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial.

Namun dalam perkembangannya, peranan industri kecil mendapat banyak kendala dan tidak jarang keberadaannya mudah gulung tikar. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala, diantaranya dalam *bidang permodalan, kualitas sumber daya, sarana dan prasarana, serta bidang pemasaran yang terbatas*. Selain itu lokasi industri yang kurang strategis mengakibatkan jangkauan yang sulit dijangkau oleh para konsumen. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi produk yang dihasilkan. Dan selanjutnya akan berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan, yang mempersulit pengumpulan modal yang dibutuhkan untuk pengembangan usahanya. Untuk itulah peranan pemerintah dalam membina industri kecil sangat diperlukan agar industri kecil tersebut dapat berkembang lebih pesat dan tetap menjaga kualitas produk yang ada.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian dan penulisan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Lapangan

Metode penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian ini. Dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan yang berupa:

- a. Observasi (peninjauan lapangan) atau pengamatan lapangan.
- b. Interview (wawancara) langsung dengan sumber yang mendukung.

2. Penelitian Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan jalan mengambil data-data teoritis dengan melihat dan mempelajari beberapa referensi/literature yang diperlukan dan terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Dasar Industri Kecil

Di Indonesia, belum ada batasan mutlak tentang industri kecil yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum. Winardi (1994) mendefinisikan industri kecil adalah usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa misalnya transportasi, atau jasa perhubungan yang menggunakan modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif kecil.

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah suatu kegiatan usaha industri yang memiliki asset sampai dengan 5 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan serta beromzet sampai dengan 25 miliar rupiah per tahun (Mayer, 1986).

Industri kecil adalah kegiatan untuk mengubah bentuk secara mekanis dan kimiawi produk baru yang lebih tinggi manfaatnya, baik dengan menggunakan mesin, tenaga kerja atau alat bantu lainnya guna dijual atau dipergunakan sendiri. Dengan kata lain, industri adalah kegiatan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang lebih tinggi nilainya (Rhodant,1983).

Irzan (1986) berpendapat bahwa dimensi problematik yang menyangkut persoalan kesempatan kerja, betapapun terbatasnya akan melahirkan suatu urgensi kerja guna memberikan prioritas tersendiri pada pengembangan industri kecil. Untuk itulah sikap pemerintah yang meletakkan sub sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga sebagai kantong dari berbagai upaya perluasan dan penciptaan lapangan kerja, merupakan keharusan dalam menentukan tindakan yang rasional.

Pembangunan Sektor Industri

Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai pembangunan sektor industri kecil, terlebih dahulu mengemukakan pengertian pembangunan sektor industri itu sendiri. W.J.S Poerwadarminta (1984:2) mengungkapkan yang dimaksud pembangunan adalah “pembinaan, hal/cara, pembuatan dan sebagainya, membangkitkan, mendirikan, mengadakan sesuatu, membentuk, memagari”. Lebih lanjut Tjokroamidjojo (1994:222) mengartikan pembangunan sebagai “suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik”. Dari kedua pengertian itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan adalah suatu usaha mengadakan sesuatu secara berkesinambungan untuk mencapai keadaan yang lebih baik.

Yang dimaksud dengan industri, menurut W.J.S Poerwadarminta (1984:380) adalah perusahaan untuk membuat atau menghasilkan barang-barang.

Pengertian industri yang digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan industri oleh pemerintah adalah sesuai dengan UU No.5 Tahun 1984 tentang perindustrian yaitu “kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang yang nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri”, (1994:20)

Pengelompokan Industri

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.589 Tahun 1999 (1999:20) industri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Industri Hulu/disebut Industri Dasar, yakni berwujud industri yang mengelola sumber atau bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi yang padat modal.
- b. Industri Hilir/disebut industri Aneka, yakni berwujud industri yang mengelola sumber daya alam dan energi (pertanian, kehutanan, pertambangan, dan energi) dan industri manufaktur.
- c. Industri Kecil, digambarkan sebagai industri padat karya yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor lain terutama pertanian.

Menurut Biro Pusat Statistik dalam Arsyad (1988:176), pengelompokan industri menurut jumlah tenaga kerja dibedakan menjadi:

1. Perusahaan/Industri Besar jika mempekerjakan 100 orang atau lebih.
2. Perusahaan/Industri Sedang jika mempekerjakan 20-99 orang.
3. Perusahaan/Industri Kecil jika mempekerjakan 5-19 orang.
4. Industri Kerajinan Rumah Tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar).

Batasan Industri Kecil

Batasan dan definisi dari industri kecil selama ini masih mengalami kekaburan, begitu juga dengan batasan antara sektor produksi dan jasa. Sementara patokan dan penggolongan yang biasanya dipakai adalah menekankan pada aspek jumlah tenaga kerja dan modal. Biro Pusat Statistik dalam Kuncoro (1997:314-315) mengklasifikasikan :

“Industri kecil berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu antara 5 sampai 19 orang. Departemen Perdagangan lebih menitik beratkan kepada aspek permodalan, bahwa suatu usaha disebut usaha kecil apabila permodalannya kurang dari Rp.25.000.000;00. departemen Perindustrian mendefinisikan industri kecil sebagai industri yang mempunyai aset tidak lebih dari Rp. 600.000.000;00. KADIM mendefinisikan industri kecil sebagai sektor usaha yang memiliki aset maksimal Rp. 250.000.000;00, tenaga kerja paling banyak 300 orang dan nilai penjualan dibawah Rp. 100.000.000;00. departem Koperasi dan PKM sependapat dengan BANK Indonesia, yang menggolongkan usaha kecil (PK) berdasarkan kreteria omzet usaha tidak lebih

dari Rp 2 Milyar dan kekayaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00”

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Kecil

Sistem produksi oleh Elwood S. Buffa (dalam Djoko Sudjono 1983:80) diberi pengertian sebagai :”Wahana yang dipakai dalam mengubah masukan-masukan (input) sumber daya untuk menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat”. Apabila semuanya berjalan dengan semestinya, akan dihasilkan keluaran (output) berupa produk dan jasa yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, biaya, serta harga yang sesuai. Hal ini sesuai dengan tujuan umum perusahaan, yaitu untuk suatu keuntungan atau laba.

Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk Dalam Membina Pengerajin Industri Kecil Genteng

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:667) disebutkan bahwa kata peranan berasal dari kata peran yang mendapat akhiran. Peran berarti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan diartikan sebagai “bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Sedangkan Miftah Thoha (1988:10) mengatakan “ suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur atau karena adanya suatu kantor yang dikenal”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan adalah serangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok karena suatu jabatan atau kedudukan tertentu. Dengan demikian peranan tersebut tidak saja hanya dilakukan oleh seseorang akan tetapi juga oleh suatu hal ataupun kelompok tertentu yang memang mempunyai tugas dan kewewenangan untuk melaksanakan peranan tersebut.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 07 Tahun 2002 tersebut, maka para pelaksana atau pegawai dapat menjadikannya sebagai pedoman melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Struktur organisasi dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk meliputi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, sub-sub Dinas, Seksi-seksi dan Staf.

Kuantitas dan Kualitas Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi daerah Kabupaten Nganjuk

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil di Kabupaten Nganjuk, harus didukung oleh aparat yang memadai sesuai kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan pembinaan industri kecil.

Peningkatan pegawai baik kuantitas maupun kualitas akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah. Agar pelaksanaan tugas berhasil dengan baik, harus didukung oleh pegawai yang berkemampuan dan profesional dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing.

Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk memiliki 70 pegawai dengan jabatan sebagai Kepala Dinas (1 orang), Kepala Bagian Tata Usaha (1 orang), Kepala Sub Dinas (4 orang), Kepala Seksi (11 orang) dan Staf (53 orang).

Tabel 4.1

Prosentase Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SLTP	4	5,71 %
2	SLTA	44	62,85 %
3	Diploma	10	14,29 %
4	Sarjana	9	12,80 %
5	Pasca Sarjana	3	4,30 %
	Jumlah	70	100,00 %

Sumber: Bagian tata Usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk sebagian besar berpendidikan SLTA yaitu sebesar 62,85 %, dengan jumlah 44 orang.

Perkembangan Industri Kecil Genteng di Desa Kaloran

Dalam tabel 4.11 berikut ini akan disajikan data-data mengenai perkembangan industri kecil genteng Desa Kaloran. Akan tetapi tidak dapat disajikan secara terperinci karena selain usahanya masih sederhana, hubungan antara pemilik usaha dan karyawan bersifat kekeluargaan dan tidak adanya penerapan sistem administrasi secara formal. Berikut ini perkembangan industri kecil genteng yang terjadi pada 6 (enam) tahun terakhir mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 4.11
Perkembangan Industri Kecil Genteng di Desa Kaloran
Periode Tahun 2014 - 2019

No	Periode Tahun	Unit Usaha (Unit)	Tenaga kerja (Orang)	Nilai Produk (Rp)
1	2014-2015	5	58	4.250.000
2	2015-2016	5	61	4.500.000
3	2016-2017	5	69	4.800.000
4	2017-2018	5	78	5.400.000
5	2018-2019	6	83	7.560.000

Sumber : Data Primer Diolah

Peningkatan Pendapatan Pengrajin

Yang dimaksud pengrajin industri kecil dalam penelitian di sini adalah tenaga kerja dalam industri genteng yang berasal dari keluarga sendiri. Sedangkan tenaga kerja lain atau pekerja tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan ini, sebab pekerja tersebut sudah diupah, dan upah ini merupakan usaha produktif bersama-sama dengan biaya operasi yang lain. Sedangkan yang dimaksud pendapatan di sini adalah merupakan nilai bersih yang di dapat dari hasil penjualan atau nilai produksi dengan biaya-biaya teknis saja tanpa memperhitungkan upah tenaga kerja sendiri yang tidak dibayar, penyusutan dan perawatan mesin-mesin dan peralatan lainnya. Biaya teknis tersebut meliputi bahan baku, upah tenaga kerja dan bahan-bahan lainnya dan biaya ini telah dikeluarkan dalam proses produksi.

Pada tabel 4.12 berikut ini akan disajikan data tentang prosentase peningkatan pendapatan pengrajin setelah diadakan pembinaan dan pemberdayaan.

Tabel 4.12
Prosentase Peningkatan Pendapatan Pengrajin Industri Kecil Genteng Desa Kaloran Periode Tahun 2014/2019

No	Periode Tahun	Jumlah(Rp)	Prosentase
1	2014-2015	4.250.000	-
2	2015-2016	4.500.000	5,9 %
3	2016-2017	4.800.000	6,7 %
4	2017-2018	5.400.000	12,5 %
5	2018-2019	7.560.000	40 %

Sumber: Data Primer Diolah

Dari tabel di atas dapat dibaca bahwa pada periode tahun 2015/2016, pendapatan pengrajin mengalami peningkatan sebesar 5,9 % kemudian pada periode tahun 2016/2017 mengalami peningkatan meski hanya kecil yakni sebesar 6,7 % selanjutnya pada periode tahun 2017/2018 mengalami peningkatan sebesar 12,5 % dan pada periode tahun 2018/2019 mengalami peningkatan yang drastis yaitu sebesar 40%.

Variabel Tingkat Kemanfaatan Pembinaan oleh Dinas Perindagkop Bagi Para Pelaku Usaha Kecil

Tabel 4.18
Frekuensi dan prosentase tanggapan responden terhadap tingkat kemanfaatan dari pembinaan oleh Dinas Perindagkop

NO	INDIKATOR / JENJANG	SB	B	CB	KB	TB	TOTAL
	SKOR	5	4	3	2	1	
1	Pelaksanaan survey untuk melakukan pembinaan secara berkala pada setiap pelaku usaha kecil	30	20	5	0	0	55
	PROSENTASE (%)	54,55	36,36	9,09	0,00	0,00	100,00
2	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)	28	21	6	0	0	55
	PROSENTASE (%)	50,91	38,18	10,91	0,00	0,00	100,00
3	Pelatihan dalam pengelolaan perusahaan dalam hal administratif keuangan	27	22	6	0	0	55
	PROSENTASE (%)	49,09	40,00	10,91	0,00	0,00	100,00
4	Pembinaan dalam rangka untuk meningkatkan proses produksi dan pengelolaan hasil produk	28	21	6	0	0	55
	PROSENTASE (%)	50,91	38,18	10,91	0,00	0,00	100,00
5	Peranan Dinas Perindagkop dalam memberikan informasi tentang modal usaha	35	18	2	0	0	55
	PROSENTASE (%)	63,64	32,73	3,64	0,00	0,00	100,00
6	Pelatihan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengajuan	37	15	3	0	0	55

	modal sebagai pinjaman lunak secara sederhana						
	PROSENTASE (%)	67,27	27,27	5,45	0,00	0,00	100,00
7	Pemenuhan bahan baku yang ada	25	21	8	1	0	55
	PROSENTASE (%)	45,45	38,18	14,55	1,82	0,00	100,00
8	Peranan Dinas Perindagkop dalam pengadaan alat peremajaan alat produksi	40	15	0	0	0	55
	PROSENTASE (%)	72,73	27,27	0,00	0,00	0,00	100,00
9	Pembinaan dalam rangka perbaikan manajemen pemasaran	30	19	6	0	0	55
	PROSENTASE (%)	54,55	34,55	10,91	0,00	0,00	100,00
10	Peranan Dinas Perindagkop dalam memfasilitasi dalam perluasan pasar dan promosi produk	32	18	5	0	0	55
	PROSENTASE (%)	58,18	32,73	9,09	0,00	0,00	100,00
11	Kerjasama Dinas Perindagkop dengan lembaga terkait, seperti : BDS, koperasi	42	11	2	0	0	55
	PROSENTASE (%)	76,36	20,00	3,64	0,00	0,00	100,00
12	Besarnya manfaat yang dirasakan dari setiap pembinaan diadakan oleh Dinas Perindagkop	48	5	2	0	0	55
	PROSENTASE (%)	87,27	9,09	3,64	0,00	0,00	100,00

Sumber : Data primer diolah

Dari tabel 4.18 diatas tampak bahwa pada umumnya responden merasakan manfaat yang lebih baik dari pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop. Hal ini ditunjukkan oleh hampir seluruh responden yang menyatakan sangat baik terhadap kinerja para petugas dari Dinas Perindagkop yang ditunjukkan indikator tingkat kemanfaatan dari pembinaan yang telah dilaksanakan, yaitu sebanyak 60,91 %. Dan responden yang lainnya menyatakan baik sebanyak 31,21 %, serta 7,73 % menyatakan cukup baik. Dari interpretasi data indikator tingkat kemanfaatan dari pembinaan yang dirasakan oleh responden, berarti dapat dikatakan hampir seluruh responden merasakan manfaat dari pembinaan tersebut menjadi lebih baik pada beberapa aspek. Yakni peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan, kualitas SDM dan kualitas produksi dari awal sampai akhir.

Variabel Tingkat Kinerja Pelayanan Lembaga Mandiri Pelaksana Program MAP

Tabel 4.19

Frekuensi dan prosentase tanggapan responden terhadap tingkat kinerja pelayanan pada kondisi prasarana dan sarana kantor (data kuantitatif, tingkat lima)

NO	INDIKATOR / JENJANG	SM	M	CM	KM	TM	TOTA
	SKOR	5	4	3	2	1	L
1	Kualitas kantor Koperasi	20	25	10	0	0	55
2	Kenyamanan ruang kerja	36	18	1	0	0	55
3	Sarana penunjang ruang kerja (parkir, toilet, dsb)	40	12	3	0	0	55
	PROSENTASE (%)	58,18	33,33	8,48	0,00	0,00	100,00

Dari tabel diatas tampak bahwa pada umumnya responden memberikan tanggapan tentang kondisi prasarana dan sarana kantor pelayanan secara merata. Akan tetapi dari interpretasi data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan memadai yaitu sebanyak 58,18 % terhadap indikator-indikator sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan. Hal ini berarti bahwa para pelaku industri kecil merasa nyaman saat pelayanan dipengaruhi oleh tampilan fisik berupa keadaan kantor, kenyamanan ruang kerja dan keberadaan sarana penunjang ruang kerja yang memadai.

Tabel 4.20

Frekuensi dan prosentase tanggapan responden terhadap tingkat kinerja pelayanan pada fasilitas penunjang (data kuantitatif, tingkat lima)

NO	INDIKATOR / JENJANG	SM	M	CM	KM	TM	TOTAL
	SKOR	5	4	3	2	1	
1	Dukungan peralatan penunjang operasional	37	15	3	0	0	55
2	Dukungan bahan penunjang kegiatan administrasi	37	17	1	0	0	55
3	Dukungan prasarana fisik untuk ruang tunggu, tenaga counter, dan ruang karyawan administrasi	40	10	5	0	0	55
	PROSENTASE (%)	69,09	25,45	5,45	0,00	0,00	100,00

Dari tabel diatas tampak bahwa pada umumnya responden menyatakan sangat memadai tentang fasilitas pendukung yang ada di kantor koperasi. Ini ditunjukkan dengan sebagian besar tanggapan para responden yang mencapai 69,09 %. Hal ini berarti bahwa pelayanan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan fasilitas pendukung yang memadai sehingga para pelaku industri kecil dapat dilayani dengan baik pula.

Tabel 4.21

Frekuensi dan prosentase tanggapan responden terhadap tingkat kinerja pelayanan pada dukungan petugas pelayanan (data kuantitatif, tingkat lima)

NO	INDIKATOR / JENJANG	SM	M	CM	KM	TM	TOTAL
	SKOR	5	4	3	2	1	
1	Apakah kelembagaan Koperasi telah didukung oleh karyawan administrasi yang memadai	39	15	1	0	0	55
2	Apakah kegiatan operasional Koperasi telah didukung oleh petugas lapangan yang memadai	42	7	6	0	0	55
3	Apakah kelembagaan Koperasi telah didukung dengan struktur pengelolaan organisasi yang memadai	42	10	3	0	0	55
	PROSENTASE (%)	74,55	19,39	6,06	0,00	0,00	100,00

Dari tabel diatas tampak bahwa pada sebagian besar responden menyatakan sangat memadai akan keberadaan petugas pelayanan. Apabila dilihat dari variabel dukungan petugas pelayanan bahwa sebagian besar menyatakan sangat memadai sebanyak 74,55 % dan menyatakan memadai sebesar 19,39 %. Sehingga dapat dikatakan bahwa dukungan petugas pelayanan dan pengelolaan koperasi secara organisatoris telah berjalan dengan baik sebagai wujud dari baiknya tampilan fisik yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Pertama, peranan Dinas Perindagkop dalam pembinaan dan pemberdayaan pelaku industri kecil sangat besar keberadaannya guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta menambah pengalaman dalam menjalankan roda usaha khususnya industri genteng. Selain itu, pembinaan dan pemberdayaan perlu diadakan secara berkala sehingga para pelaku dapat meningkatkan kualitas produksi, kualitas produk dan kualitas pengelolaan industri secara manajerial yang meliputi The Six M (Man, Money, Materials, Machines, Methodes, dan Markets).

Kedua, faktor-faktor penghambat dalam pembinaan dapat diketahui dari beberapa sisi, yaitu :

1. Dari sisi pelaksanaan pembinaan dipengaruhi oleh :
 - a. Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang ada pada Dinas Perindagkop. Ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah SDM ahli dengan pelaku industri kecil dan jumlah tempat yang membutuhkan pembinaan.
 - b. Keterbatasan dana untuk melaksanakan pembinaan
2. Dari sisi pengrajin dipengaruhi oleh :
 - a. Rendahnya kualitas SDM pelaku industri kecil yang disebabkan kebanyakan pengrajin memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang tergolong rendah.
 - b. Keterbatasan modal sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan pengrajin dan menurunnya motivasi dalam memproduksi.
 - c. Lemahnya manajemen yang dipengaruhi dalam menjalankan usaha terutama dalam administrasi keuangan, terkadang belum bisanya memisahkan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan keluarga.

Dapat disimpulkan pula bahwa manfaat pembinaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan industri, baik dari segi jumlah tenaga kerja, nilai produksi dan pendapatan pengrajin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L., *Pengantar Perancangan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, 1999.
- Departemen Perdagangan dan Perindustrian RI, *Pedoman Pembinaan Industri Kecil, Menengah dan Koperasi*, Penerbit Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, 2002.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Kunci Keberhasilan*, CV Haji Masagung Jakarta, 1990.
- Irzan. A. S., *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, Penerbit LP3ES Jakarta, 1986.
- Mayer, L. dan J.R. Coleman, *Organisasi dan Administrasi*, Penerbit Binarupa Aksara Jakarta, 1986.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1982.
- Rhodant, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, California Manajemen. Review, 1983.
- Swastha, B. dan I. Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995.